



Judul : Uji Publik RUU Sisdiknas Komisi X Tampung Masukan Masyarakat
Tanggal : Senin, 29 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Uji Publik RUU Sisdiknas Komisi X Tampung Masukan Masyarakat

RANCANGAN Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) akan segera dilakukan uji publik. Senayan siap menampung berbagai masukan dari masyarakat dan pemerhati dunia pendidikan.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, pihaknya akan menyerahkan draf RUU Sisdiknas ke Badan Legislasi (Baleg) DPR pada akhir September ini. Jika sudah disepakati, draf tersebut bisa mulai disebarakan ke publik dan dibahas melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia.

"Dalam draf RUU Sisdiknas, salah satu pokok penting adalah penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan menengah," ujar Hetifah dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).

Hetifah menegaskan, revisi UU Sisdiknas diperlukan agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan tantangan global yang dihadapi dunia pendidikan. Sebab beleid yang ada sekarang sudah tidak memadai untuk mendukung pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat.

"Revisi ini juga bertujuan menyatukan regulasi pendidikan yang selama ini tumpang tindih, sekaligus menyederhanakan sistem hukum pendidikan agar lebih terpadu," ujar politikus Golkar ini.

Dalam proses penyusunan kebijakan dalam RUU Sisdiknas, kata Hetifah, pihaknya sudah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat (19/9/2025). "FGD di UMS sangat produktif sekali dan memberikan banyak pencerahan, informasi, maupun aspirasi yang nanti akan dicermati," ucap legislator asal Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) ini.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menambahkan, pihaknya siap menampung beragam masukan dari masyarakat dalam proses revisi RUU Sisdiknas. Sebab beleid yang sudah berusia 22 tahun itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan harus dilakukan secara hati-hati dan inklusif.

"Proses adjustment (penyesuaian) ini butuh masukan dan partisipasi dari masyarakat. Jangan seperti tahun 2022, saat draf revisi dari Pemerintah ditolak karena dinilai terburu-buru dan menuai kritik publik," kata Fikri di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Komisi X DPR, kata Fikri, juga tengah mengkaji skema pembiayaan pendidikan dasar yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar bisa digratiskan. Termasuk kemungkinan memperluasnya menjadi 13 tahun pendidikan gratis, yakni dari PAUD hingga SMA. ■ TIF